BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali telah dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di dunia, yang terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Kebudayaan lokal menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Bali, selain keindahan alam yang dimilikinya. Sistem kemasyarakatan di Bali disebut sebagai Desa pakraman, yang merupakan istilah lain untuk desa adat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 mengenai Desa Adat di Bali, 2019 (*Perda, 2019*). Desa Pekraman adalah kesatuan komunitas hukum adat di provinsi Bali yang memiliki tradisi dan tata krama yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Hindu. Desa ini terikat dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa, memiliki wilayah tertentu, kekayaan sendiri, dan hak untuk mengelola urusan internalnya. Selain berfungsi dalam aspek sosial, budaya, dan keagamaan, Desa Pakraman juga memainkan peran penting dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum, yang umumnya bersumber dari pemerintah (Suryandari et al., 2019). Mengingat bahwa pembiayaan Desa Pakraman tidak termasuk dalam kebijakan pembiayaan pemerintah, Desa Pakraman mempunyai peranan dan kontribusi yang signifikan dalam masyarakat. Untuk menghadapi dinamika sosial ekonomi, perlu dilakukan modifikasi terhadap kegiatan Desa Pakraman menuju usaha yang lebih produktif, sehingga

diperlukan tata kelola perekonomian yang mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 1984, Gubernur Bali Prof. Dr. Ida Bagus Mantra menginisiasi pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diseluruh Desa Pakraman di Bali (Nugroho, 2024).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 menyebutkan “LPD melaksanakan kegiatan usaha di wilayah desa ditujukan untuk masyarakat Krama Desa” (Siska et al., 2023). Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) telah terbukti memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan Bali sebagai aset bangsa. LPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi transaksi keuangan masyarakat desa, tetapi juga sangat membantu dalam mengatasi keterbatasan akses dana bagi masyarakat pedesaan yang mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas. Keberhasilan LPD merupakan hasil dari konsep pendirian dan pengelolaan yang diambil dari kearifan lokal dan budaya masyarakat Bali, yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong (Amanda & Suputra, 2019). Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di setiap desa adat bertujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi di pedesaan dengan mendorong masyarakat untuk lebih gemar menabung serta menyediakan akses kredit bagi usaha kecil. Tujuan ini adalah untuk menghilangkan praktik eksploitasi dalam pemberian kredit, menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha di tingkat desa, dan meningkatkan tingkat monetisasi di daerah pedesaan (Dian, 2023).

Meskipun LPD terus berkembang dan dikelola dengan baik, kemungkinan terjadinya kasus kecurangan akuntansi tetap ada. Beberapa LPD telah mengalami kasus kecurangan yang dilakukan baik oleh ketua maupaun pegawai LPD itu sendiri. Salah satu contoh kasus kecurangan akuntansi yang terjadi dapat ditemukan di beberapa LPD yang terdapat di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Kasus Kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Jembrana

No	Nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	Jenis Kasus	Jumlah Kerugian	Tahun
1	LPD Desa Adat Taman Munduk Anyar (Kecamatan Mendoyo)	Kasus penggelapan dana nasabah	Kerugian Rp. 80.000.000	2016
2	LPD Desa Adat Delodberawah (Kecamatan Mendoyo)	Kasus penggelapan dana nasabah	Kerugian Rp. 500.000.000	2019
3	LPD Desa Adat Tegalcangkring (Kecamatan Mendoyo)	Kasus penggelapan dana nasabah	Kerugian Rp. 100.000.000	2020
4	LPD Desa Adat Mendoyo Dangin Tukad (Kecamatan Mendoyo)	Kasus penggelapan dana nasabah	Kerugian Rp. 2.154.742.648	2021
5	LPD Desa Adat Tuwed (Kecamatan Melaya)	Kasus penggelapan dana nasabah	Kerugian Rp.989.822.472	2022
6	LPD Desa Adat Baluk (Kecamatan Negara)	Kasus penggelapan dana nasabah	Kerugian Rp.1.200.000.000	2024

Sumber : (Detik, 2023)

Berdasarkan kasus-kasus yang sudah terjadi, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan di LPD. Kasus kecurangan (*Fraud*) yang terjadi di LPD Kabupaten Jembrana umumnya melibatkan pihak internal, seperti yang terlihat di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Melaya, dan Kecamatan Negara. Kasus penggelapan dana yang terjadi di beberapa LPD di Kabupaten Jembrana mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan dan transparansi keuangan.

Berdasarkan fenomena yang diamati menunjukkan adanya praktik kecurangan dalam dunia nyata, sehingga penelitian ini memilih untuk menggunakan variabel kecenderungan kecurangan karena secara metodologis lebih memungkinkan untuk diteliti. Kecurangan merupakan tindakan yang bersifat tersembunyi, disengaja, dan seringkali tidak terungkap secara terbuka, sehingga sulit untuk diidentifikasi secara langsung dalam penelitian. Pelaku kecurangan cenderung menyembunyikan tindakannya untuk menghindari sanksi hukum atau sosial, yang menyebabkan data mengenai kecurangan aktual sangat terbatas dan sulit diverifikasi kebenarannya (Damayanti & Purwantini, 2021).

Meskipun demikian, LPD tetap memegang peranan penting dalam perekonomian lokal. Untuk memahami lebih jauh sebaran LPD yang ada di seluruh Bali. Berdasarkan data dari Bali Satu Data Indonesia Provinsi Bali, sebaran LPD di setiap Kabupaten yang ada di Provinsi Bali berjumlah 1.439 LPD dengan jumlah aset yang dikelola sekitar Rp. 27,064 triliun

(NusaBali, 2023). Berikut adalah sebaran LPD di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali.

Tabel 1.2 Sebaran LPD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Jumlah LPD
1	Badung	122
2	Bangli	159
3	Gianyar	270
4	Buleleng	169
5	Jembrana	62
6	Karangasem	190
7	Tabanan	311
8	Klungkung	119
9	Denpasar	35
	Jumlah	1.439

Sumber: Satu Data Indonesia Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah LPD di Kabupaten Jembrana tergolong paling sedikit kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar, yaitu sebanyak 62 LPD dari total 1.439 LPD yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Meskipun jumlah LPD di Kabupaten Jembrana relatif sedikit dibandingkan daerah lain seperti Tabanan, Gianyar, atau Karangasem, hal ini tidak menjamin minimnya risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pemilihan Kabupaten Jembrana sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansi empiris dan kontekstual yang kuat. Salah satu kasus yang masih menarik perhatian masyarakat yaitu kecurangan (*fraud*) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Baluk pada tahun 2024. Dalam kasus ini, seorang oknum kasir melakukan penggelapan dana nasabah dengan total kerugian mencapai Rp. 1,26 Miliar. Dari jumlah

tersebut, sebesar Rp. 1.05 Miliar disalahgunakan langsung oleh pelaku dengan modus penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, pemalsuan bukti transaksi, hingga manipulasi sistem pencatatan keuangan, fakta ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal LPD yang seharusnya berperan penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan desa.

Tidak hanya di LPD Baluk, berbagai kasus serupa juga terjadi di sejumlah LPD lain di wilayah Jembrana. Misalnya, kasus di LPD Mendoyo Dangin Tukad yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2,1 Miliar akibat kredit fiktif dan penyalahgunaan wewenang oleh pengurus. Selain itu, di LPD Yehembang Kauh, mantan ketua dan bendahara juga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan total kerugian mencapai Rp, 2 Miliar. Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa praktik *fraud* bukanlah kejadian yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi persoalan sistematis di beberapa LPD di Jembrana. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap praktik kecurangan dalam pengelolaan keuangan lembaga adat di Jembrana masih menjadi persoalan yang serius. Oleh karena itu, Kabupaten Jembrana merupakan lokasi yang sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian, khususnya dalam konteks pencegahan *fraud* melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan.

Pada kenyataannya berdasarkan data yang ditemukan, terdapat beberapa kasus kecurangan dengan nilai kerugian yang cukup tinggi terjadi di beberapa LPD di kabupaten Jembrana. Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah LPD yang lebih sedikit tidak menjamin sistem tata kelola yang

lebih baik, melainkan mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, moralitas inividu pada pengelolanya, serta sistem kompensasi yang belum optimal (Damayanti & Purwantini, 2021). Oleh karena itu, fenomena ini menjadi alasan yang kuat dan relevan untuk menjadikan Kabupaten Jembrana sebagai lokasi penelitian, guna mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi meskipun pada wilayah dengan jumlah LPD yang tidak sebanyak daerah lain.

Kabupaten Jembrana, jumlah LPD yang tersebar adalah sebanyak 62 LPD yang ada di setiap wilayahnya yang terbagi menjadi 5 Kecamatan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah LPD serta data kesehatan LPD yang terdapat di Kabupaten Jembrana, menurut LPLPD Kabupaten Jembrana Tahun 2024.

Tabel 1.3 Jumlah LPD dan Data Kesehatan LPD di Kabupaten Jembrana

No	Nama Kecamatan	Jumlah LPD	Data Kesehatan			
			Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat
1	Kecamatan Mendoyo	19	14	3	1	1
2	Kecamatan Pekutatan	12	10	1	-	1
3	Kecamatan Melaya	13	13	-	-	-
4	Kecamatan Negara	10	8	1	-	1
5	Kecamatan Jembrana	8	6	-	1	1
Jumlah		62	51	5	2	4

Sumber: LPLPD Kabupaten Jembrana, 2024

Berdasarkan data jumlah LPD dan kondisi kesehatannya di lima kecamatan di Kabupaten Jembrana, dapat disimpulkan bahwa sebagian

besar LPD dalam kondisi sehat. Dari total 62 LPD, sebanyak 53 LPD (82,8%) masuk dalam kategori sehat, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar LPD di wilayah ini telah beroperasi dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa LPD yang masuk dalam kategori cukup sehat (5 unit), kurang sehat (2 unit), dan tidak sehat (4 unit). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum kondisi LPD di Kabupaten Jembrana cukup baik, namun masih terdapat beberapa LPD yang perlu mendapat perhatian lebih untuk meningkatkan kinerja dan kesehatannya. Secara khusus, Kecamatan Melaya memiliki kondisi yang paling baik karena seluruh LPD-nya masuk dalam kategori sehat. Sementara itu, Kecamatan Mendoyo memiliki jumlah LPD terbanyak, namun masih terdapat beberapa LPD yang kurang sehat dan tidak sehat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut untuk memastikan semua LPD dapat beroperasi dengan baik dan stabil. Fenomena ini tidak terlepas dari kecenderungan yang mendorong terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fraud Diamond Theory*, yang menjelaskan faktor-faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan.

Fraud diamond theory merupakan teori yang dikembangkan oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson sebagai pengembangan dari *fraud triangle theory* (Fadilah & Wahidahwati, 2019). Teori ini menjelaskan bahwa terdapat empat elemen utama yang dapat mendorong seseorang melakukan kecurangan, yaitu *pressure* (tekanan), *oppurtunity* (kesempatan), *ratinalization* (rasionalisasi), dan *capability* (kapabilitas)

(Laoli, 2022). Tekanan mengacu pada situasi atau kondisi yang memaksa seseorang untuk melakukan kecurangan, seperti tekanan keuangan atau target yang sulit dicapai (Nadia et al., 2023). Adanya kesempatan apabila terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya kecurangan (Mutiara et al., 2024). Rasionalisasi merupakan proses pembenaran yang dilakukan oleh pelaku untuk meyakini dirinya bahwa tindakan yang dilakukan bukan sesuatu yang salah (Siska Yanti et al., 2023). Sementara itu, kapabilitas merupakan faktor tambahan yang membedakan *fraud diamond* dari *fraud triangle*, yaitu kemampuan seseorang dalam mengeksploitasi kesempatan yang ada, seperti posisi, kecerdasan, atau kepercayaan yang diberikan. Dengan mempertimbangkan keempat elemen ini, *fraud diamond theory* memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan dalam suatu organisasi.

Kecenderungan merujuk pada dorongan untuk melakukan kecurangan yang muncul akibat adanya peluang atau kesempatan yang tersedia (Meliana & Sujana, 2024). Menurut Nugroho, (2024) kecurangan akuntansi adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok yang mempengaruhi laporan keuangan dan dapat menyebabkan kerugian bagi suatu organisasi dan pihak lainnya. Selain itu LPD juga belum mempunyai struktur dan sistem yang kompleks, yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang mengelola LPD tersebut, dan masih adanya peran ganda di LPD yang memungkinkan individu-individu tertentu untuk menemukan celah dalam melakukan kecurangan. Hal ini memerlukan

kerjasama yang kuat antara masyarakat desa pekraman, pengurus desa pekraman, dan pengelola LPD agar terhindar dari perilaku merugikan seperti kecurangan (*fraud*). Kecurangan semacam ini dapat mengganggu operasional organisasi bahkan berpotensi menghancurkannya. Berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal LPD untuk meraih keuntungan pribadi meliputi pembuatan deposito fiktif atas nama pribadi, pengajuan kredit fiktif atas nama orang lain, pemanfaatan jaminan nasabah untuk dijaminkan ke LPD lain tanpa sepengetahuan pemilik, serta pemberian kredit di luar desa (Sari, 2022).

Adanya kesempatan (*opportunity*) sebagai sebuah keadaan atau kondisi tertentu yang menjadi penyebab seseorang dapat melakukan tindakan kecurangan dengan mudah (Suarniti & Ratna Sari, 2020). Kesempatan ini biasanya muncul karena beberapa LPD belum mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, yaitu *Good Coporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) disusun oleh *Organization for Economic Cooperation and Development OECD* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) yang disingkat dengan TARIF (Yanti et al., 2023). Beberapa LPD masih belum menerapkan prinsip akuntabilitas secara optimal, hal ini terlihat dari kurangnya kejelasan mengenai fungsi dan wewenang di dalam LPD, karena belum ada dokumentasi tertulis mengenai tugas masing-masing dari pemangku kepentingan (Nugroho, 2024). Selain itu, banyak prinsip *Good Corporate*

Governance (GCG) yang seharusnya diterapkan oleh organisasi seperti pengawasan internal oleh pihak berwenang, sistem pengendalian internal yang mengatur seluruh kegiatan organisasi, pedoman perilaku etika, serta mekanisme pelaporan untuk menangani dugaan kecurangan. Penelitian sebelumnya oleh Sinarwati et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas badan pengawas internal yang merupakan bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya *fraud* pada LPD di Kabupaten Buleleng. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan yang optimal dapat mempersulit ruang bagi pelaku untuk melakukan tindakan curang. Dengan demikian, penguatan prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan LPD, khususnya pada aspek pengawasan dan tata kelola internal, menjadi krusial dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan lembaga maupun masyarakat adat sebagai pemilik dana.

Penelitian yang dilakukan oleh Prayudi et al., (2017) mengungkap bahwa lemahnya pemahaman peran pengawasan dan adanya kesenjangan harapan antar pihak dapat menurunkan efektifitas pengawasan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Temuan ini mendukung pentingnya penerapan *good corporate governance*, khususnya pada aspek akuntabilitas dan pengawasan internal, untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan LPD.

Namun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Yusuf Ansori & Kuntadi, (2022) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Artinya, semakin

baik implementasi GCG (melalui pengendalian internal, akuntabilitas, dan kompetensi SDM), maka semakin kuat pula sistem tata kelola, sehingga potensi atau kecenderungan terjadinya kecurangan dapat ditekan. Inkonsistensi temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kecenderungan kecurangan, seperti yang terlihat dalam perbedaan hasil antara Prayudi et al. (2017) menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG secara signifikan mampu mengurangi risiko kecurangan dalam perusahaan, yang menunjukkan efek positif dan tata kelola yang baik terhadap integritas organisasi namun hasil yang berbeda justru diperoleh oleh Ansori & Kuntadi (2022), yang menyatakan bahwa pengaruh GCG terhadap kecenderungan kecurangan tidak begitu signifikan atau bahkan tidak terlihat secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali pengaruh GCG terhadap kecenderungan kecurangan, khususnya dalam konteks LPD di Kabupaten Jember.

Adapun faktor lain yaitu rasionalisasi (*razionalitation*) yang merupakan sifat atau perilaku yang dimiliki seseorang dalam membenarkan tindakan curang yang telah dilakukannya, dengan mencari alasan atau justifikasi agar perbuatannya terlihat wajar dan dapat diterima (Pestianingsing, 2024). Dalam penelitian ini, moral individu memegang peranan penting dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan rasionalisasi terhadap tindakan tidak etis. Hasil penelitian Apriana & Martadinata, (2024) menunjukkan bahwa kualitas kinerja pegawai memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh *Total Quality Management*

terhadap kinerja keuangan. Hal ini selaras dengan fokus penelitian ini yang menyoroti pentingnya moralitas individu sebagai faktor penentu dalam mencegah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Sebagaimana dalam *Fraud Diamond Theory*, moralitas individu berperan dalam membatasi rasionalisasi individu untuk melakukan tindakan curang, sehingga sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang sehat dan bebas dari fraud. Menurut Febriani et al., (2024) menjelaskan bahwa moral diartikan sebagai seperangkat norma perilaku yang diterapkan pada setiap individu untuk berinteraksi dengan benar dalam masyarakat, sehingga menciptakan rasa saling menghormati. Tingkat penalaran moral individu berfungsi sebagai dasar untuk memahami kecenderungan seseorang dalam melakukan tindakan, terutama ketika dihadapkan pada konflik moral, yang berkaitan dengan tingkat kematangan moral yang dimiliki. Menurut Triyana & Kuntadi, (2023) menyebutkan saat individu dihadapkan pada tekanan untuk menyusun laporan keuangan yang menguntungkan atau untuk memanipulasi data akuntansi, moralitas mereka dapat berperan sebagai faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan. Moralitas individu merujuk pada tindakan yang memberikan manfaat bagi orang lain, berdasarkan pada suara hati yang diakui sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan (Kesumawati & Pramuki, 2021). Amalia & Suryatimur, 2022 berargumen bahwa moralitas dianggap sebagai tindakan yang positif karena mencakup kewajiban dan tanggung jawab yang mendorong perilaku baik yang dilakukan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Hal ini dapat

diartikan bahwa moralitas individu adalah sikap dan perilaku yang positif, di mana seseorang bertindak tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi.

Moralitas sangat berkaitan dengan cara seseorang bersikap dan bertindak. Individu yang memiliki tingkat penalaran moral yang tinggi cenderung lebih mungkin untuk melakukan tindakan yang benar. Sebaliknya, individu dengan tingkat penalaran moral yang rendah memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mita & Indraswarawati (2021), apabila tindakan seseorang dinilai baik oleh masyarakat, dianggap sesuai, diterima, dan berkontribusi pada perbaikan lingkungan di sekitarnya, maka individu tersebut memiliki moralitas yang tinggi. Oleh karena itu, moralitas yang baik dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindak kecurangan (Dewi et al., 2023). Penelitian sebelumnya oleh Masdiantini et al. (2022) menunjukkan bahwa karakteristik individu seperti *whistleblowing* dan *locus of control* berperan dalam mencegah kecurangan laporan keuangan. hal ini memperkuat pentingnya aspek internal, seperti moralitas individu, untuk diteliti lebih lanjut dalam upaya menekan kecenderungan kecurangan, khususnya di lingkungan LPD. Hal yang mendasari pemilihan variabel ini adalah karena secara logis, individu dengan moralitas rendah cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2024) dan Dewi (2022) menyatakan bahwa moralitas individu yang baik memiliki dampak positif dalam mengurangi potensi

terjadinya kecurangan, karena individu dengan moral tinggi cenderung menjauhi perilaku yang menyimpang. Selain itu, pemilihan variabel ini juga didasarkan pada adanya perbedaan hasil dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel yang sama. Di samping itu, jika dilihat dari beberapa kasus kesesuaian kompensasi juga menjadi faktor untuk melakukan kecurangan akuntansi tersebut.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan yaitu tekanan (*pressure*). Tekanan menjadi salah satu faktor pendorong yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Burhan et al., 2024) kesesuaian kompensasi adalah pendapatan yang berupa uang tunai atau non tunai yang diterima secara langsung dan tidak langsung oleh karyawan atau pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada organisasi. Menurut penelitian yang dilakukan (Pestianingsing, 2024) kesesuaian kompensasi adalah tingkat kecocokan dan kepuasan karyawan terhadap imbalan yang diberikan oleh perusahaan, baik berupa upah per jam maupun gaji berkala, sebagai penghargaan atas penyelesaian tugas sesuai tanggung jawabnya. Hal ini sejalan dengan temuan (Vijaya et al., 2022) yang menyatakan bahwa rendahnya profitabilitas dapat meningkatkan risiko *finansial distress*, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tekanan. Tekanan ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan terhadap kompensasi yang diberikan yang kemudian dapat memicu kecenderungan kecurangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah penghargaan yang penting untuk karyawan, karena melalui kompensasi yang diterima seseorang dapat

memenuhi kebutuhan hidup. Kompensasi dapat menjadi motivasi yang mendorong karyawan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya demi memperoleh penghargaan tersebut. Namun, apabila kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan usaha yang telah dikerahkan, karyawan akan merasa ketidakadilan. Akibatnya, muncul kebutuhan untuk mendapatkan kompensasi yang lebih sesuai dengan kerja keras yang telah dilakukan melalui tindakan kecurangan (Nursida et al., 2022).

Menurut survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter (ACFE)* pada tahun 2019, sekitar 3,8% dari kecurangan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap gaji yang diterima. Menurut informasi yang dikutip dari laman Detik.com Bali menunjukkan bahwa gaji pegawai yang ada di Kabupaten Jembrana masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR) (Budiastrawan, 2023). Berdasarkan Keputusan Bali Nomor 869/03-M/HK/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2023. UMR di Kabupaten Jembrana ditetapkan sebesar 2,7 juta rupiah (Detik, 2023). Menurut salah satu pegawai yang ada di LPD Desa Adat Yeh Kuning yaitu Ibu Ita Novi Lestasi menyatakan bahwa kompensasi yang diterima di LPD belum sejalan dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di Kabupaten Jembrana. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai mengenai kesejahteraan dan keadilan dalam sistem penggajian, yang diharapkan dapat menjadi perhatian pihak terkait untuk perbaikan ke depan.

Penelitian mengenai kesesuaian kompensasi juga dilakukan oleh Ulantari & Suartana, (2023) memperoleh hasil kesesuaian kompensasi memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh (Trirahayu & Wirawati, 2023) yang menghasilkan kesesuaian kompensasi mempunyai pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Disamping itu hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Sari & Musmini, (2022), Damayanti & Purwantini, (2021) dan Meliana & Sujana, (2024) penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki dampak negatif terhadap kecenderungan kecurangan LPD, di mana semakin tinggi tingkat kesesuaian kompensasi, semakin rendah pula kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Namun penelitian lain menemukan hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Rismayanti & Putra, (2023), Rio et al, (2020) dan Laoli, (2022) penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin besar kompensasi yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat kecurangan yang dilakukan.

Banyaknya kasus kecurangan tersebut menunjukkan adanya potensi masalah dalam sistem pelaporan, transparansi, serta mekanisme pengawasan terhadap LPD. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut, apakah berasal dari kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan rendahnya moralitas individu dalam pengelolaan

lembaga. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk memperbaiki sistem tata kelola dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan LPD di Kabupaten Jembrana. Disamping itu meningkatnya kasus yang terjadi di LPD Kabupaten Jembrana, yang membuat beberapa LPD tidak beroperasi.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, (2024) yang berjudul Pengaruh moralitas individu, budaya organisasi, *Good Corporate Governance*, dan *ineffective monitoring* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (studi kasus pada lpd se-kecamatan seririt). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel bebas dan lokasi penelitian perbedaan pada variabel bebas yaitu dengan menambahkan variabel baru seperti kesesuaian kompensasi sebagai variabel bebas karena realita yang terjadi di lapangan kompensasi yang diperoleh tidak sesuai dengan UMR yang dimiliki hal ini dikatakan oleh salah satu pegawai yang ada di LPD Kabupaten Jembrana yaitu Ibu Ita Novi Lestari. Pemilihan LPD di Kabupaten Jembrana sebagai objek penelitian didasari oleh tingginya kasus kecurangan yang terjadi di wilayah tersebut, dimana nilai dana yang digelapkan pada setiap kasus mencapai jutaan hingga milyaran rupiah. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan di LPD, sehingga penelitian ini relevan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi dan upaya pencegahannya.

Peneliti tertarik meneliti pengaruh *Good Corporate Governance*, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi karena penyebab terjadinya kasus kecurangan berasal dari moral individu, kesesuaian kompensasi yang diperoleh, dan yang paling utama adalah lemahnya penerapan *Good Corporate Governance*, walaupun penerapan *Good Corporate Governance* pada LPD telah dilakukan tetapi tidak dijalankan dengan baik oleh karena itu banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang menyebabkan penurunan tingkat kesehatan pada LPD (Siska Yanti et al., 2023). Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menyelidiki kecendrungan kecurangan akuntansi di LPD. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjawab hipotesis yang diajukan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, MORALITAS INDIVIDU, DAN KESESUAIAN KOMPENSASI TERHADAP KECENDRONGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA LPD KABUPATEN JEMBRANA”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa masalah dan *research gap* sebagai berikut:

1. Adanya kecurangan (*fraud*) penggelapan dana yang terjadi di LPD Kabupaten Jembrana.
2. Kecurangan (*fraud*) dilakukan oleh pengurus di LPD tersebut yaitu Ketua dan Pegawai LPD.

3. Masih terdapat LPD yang belum menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*).
4. Masih rendahnya moral individu yang dimiliki sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*) di LPD tersebut.
5. Ketidaksesuaian kompensasi dengan standar UMR di Kabupaten Jembrana menimbulkan tekanan finansial bagi pegawai LPD, yang menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*).

1.3 Pembatasan Masalah

Pemberian masalah bertujuan untuk memfokuskan pembahasan pada sasaran penelitian. berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini membatasi diri pada pengaruh tiga variabel, yaitu *Good Corporate Governance*, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di lembaga perkreditan desa di Kabupaten Jembrana. Pembatasan ini didasarkan pada fenomena terkini yang menunjukkan banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang terjadi di LPD.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Jembrana.

2. Apakah moralitas individu mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Jembrana.
3. Apakah kesesuaian kompensasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Jembrana.

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Jembrana.
2. Untuk menguji pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Jembrana.
3. Untuk menguji pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Jembrana.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dapat menjadi referensi bagi

pihak lain yang berkeinginan melakukan kajian atau penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan bidang ilmu akuntansi yang diperoleh selama masa perkuliahan di Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan atau informasi untuk melengkapi kepustakaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh good corporate governance, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

c. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan di sektor lembaga keuangan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen dan karyawan pada LPD dalam pengelolaan dana masyarakat.